**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Kehadiran manusia tidak terlepas dari asal usul kehidupan di alam semesta. Manusia hakihatnya adalah makhluk ciptaan Allah SWT. Pada diri manusia terdapat perpaduan antara sifat ketuhanan dan sifat kemakhlukan. Dalam pandangan Islam, sebagai makhluk ciptaan Allah SWT manusia memiliki tugas tertentu dalam menjalankan kehidupannya di dunia ini. Untuk menjalankan tugasnya manusia dikaruniakan akal dan pikiran oleh Allah SWT. Akal dan pikiran tersebut yang akan menuntun manusia dalam menjalankan perannya. Dalam hidup di dunia, manusia diberi tugas kekhalifahan, yaitu tugas kepemimpinan, wakil Allah di muka bumi, serta pengelolaan dan pemeliharaan alam.

Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati seumpama kursi, meja, dan sebagainya. Berkumpulnya manusia akan menimbulkan manusia-manusia baru. Manusia itu juga dapat bercakap-cakap, merasa, mengerti, juga mempunyai keinginan-keinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atau perasaan-perasaannya.

Manusia dapat dikatakan berhasil baik dalam bermasyarakat tentunya dengan berperilaku sopan, hormat-menghormati, toleransi, menghargai, saling menolong dan lain sebagainya. Pembentukan masyarakat harus didasarkan pada nilai-nilai pancasila yakni nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan, sakaligus diyakini kebenaran, kebaikan, dan manfaatnya bagi pembangunan nasional yang sekaligus berpengaruh dalam kehidupan bangsa dan negara. Peningkatan SDM bangsa ini harus difokuskan pada nilai-nilai kemanusiaan (Abdullah, 2010: hlm. 7).

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan tingkat keanekaragaman yang sangat kompleks. Masyarakat dengan berbagai keanekaragaman tersebut dikenal dengan istilah mayarakat multikultural. Bila kita mengenal masyarakat sebagai sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka mampu mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu maka konsep masyarakat tersebut jika digabungkan dengan multikurtural memiliki makna yang sangat luas dan diperlukan pemahaman yang mendalam untuk dapat mengerti apa sebenarnya masyarakat multikultural itu. Multikultural dapat diartikan sebagai keragaman atau perbedaan terhadap suatu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Sehingga masyarakat multikultural dapat diartikan sebagai sekelompok manusia yang tinggal dan hidup menetap di suatu tempat yang memiliki kebudayaan dan ciri khas tersendiri yang mampu membedakan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. “Setiap masyarakat akan menghasilkan kebudayaannya masing-masing yang akan menjadi ciri khas bagi masyarakat tersebut” (Putra, 2011: hlm. 12).

Pancasila bagi masyarakat Indonesia merupakan pandangan hidup yang dapat dijadikan pedoman dalam kepribadian bangsa, maka dari itu ia diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup ketatanegeraan. pancasila berperan sebagai alat yang sebagai pengatur sikap dan tingkah laku orang Indonesia masingmasing dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa (Sila-I), dengan sesama manusia (sila II) dengan tanah air dan nusa bangsa Indonesia (Sila-III) dengan kekuasaan dan pemerintahan negara (kerakyatan) dan dengan negara sebagai kesatuan dalam rangka realisasi kesejahteraan (sila-V). Hal ini tampak dalam sejarah bahwa meskipun dituangkan dalam rumusan yang agak berbeda, namun dalam 3 buah Undang-Undang Dasar yaitu dalam pembukaan UUD’45, dalam mukadimah konstitusi RIS dan dalam mukadimah UUDS RI (1950). Pancasila tetap tercantum di dalamnya. Pancasila yang selalu dikukuhkan dalam kehidupan konstitusional itu dan menjadi pegangan bersama pada saatsaat terjadi krisis nasional dan ancaman terhadap ekosistem bangsa kita, merupakan bukti sejarah bahwa pancasila memang selalu dikehendaki oleh bangsa Indonesia sebagai dasar kehormatan Indonesia, yaitu sebagai dasar negara, hal ini karena telah tertanam dalam kalbunya rakyat dan dapat mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. (Notosoetarjo, 1962: hlm. 34).

Sila kedua pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. “Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk berbudi yang memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta” (Notosoetarjo1962: hlm. 35). Kemanusiaan terutama berarti sifat manusia yang merupakan esensi dan identitas manusia karena martabat kemanusiaannya (human dignity). Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif; jadi, tidak subjektif apalagi sewenangwenang. Beradab berasal dari kata adab yang berarti budaya. Jadi, beradab berarti berbudaya. Ini mengandung arti bahwa sikap hidup, keputusan, dan tindakan selalu berdasarkan nila-nilai budaya, terutama norma sosial dan kesusilaan (moral). Adab terutama mengandung pengertian tata kesopanan, kesusilaan atau moral. Dengan demikian, bearadab dapat ditafsirkan sebagai berdasar nilai-nilai kesusilaan atau moralitas khususnya dan kebudayaan umumnya.

Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya, baik terhadap diri pribadi, sesama manusia, maupun terhadap alam dan hewan. Pada prinsipnya kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat hakikat manusia yang berbudi, sadar nial, dan berbudaya. Kemanusiaan yang adil dan beradab telah tersimpul cita-cita kemanusiaan yang lengkap, yang memenuhi seluruh haakikat mahkluk manusia.

Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab adalah suatu rumusan sifat keluhuran budi manusia(Indonesia). Dengan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, maka setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama-sama terhadap Undang-Undang Negara, mempunyai hak dan kewajiban yang sama; setiap warga Negara dijamin haknya serta kebebasannya yang menyangkut hubungan dengan Tuhan, dengan orang-orang seorang, dengan Negara, dengan masyarakat, dan menyangkut pula kemerdekaan menyatakan pendapat dan mencapai kehidupan yang layak sesuai dengan hak asasi manusia. (Notosoetarjo1962: hlm. 36)

Melihat kondisi masyarakat Indonesia saat ini faktanya telah jauh dari makhluk Tuhan yang di katakanan adil, beradab dan berbuat sesuai kodrat hakikat manusia yang sopan dan susila nilai. Masyarakat Indonesia saat ini cenderung bersifat individu, acuh tak acuh atau masa bodoh dengan keadaan di sekitarnya. Mereka lebih mengutamakan dan mendahulukan kebutuhan atau kepentingan pribadinya. Seolah mereka dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain.

Masyarakat Indonesia saat ini telah melupakan kodratnya sebagai manusia sosial. Sekarang ini tidak heran bahwa banyak sekali terjadi kesenjangan sosial dan melencengnya moral dalam masyarakat. Apalagi para remaja saat ini yang dapat dikatakan masih labil mereka masih mencari jati diri yang sesungguhnya. Bagaimana bisa menemukan jati diri yang baik dan sesuai dengan nilai pancasila jika mereka melihat keadaan di sekitarnya yang bertolak belakang dengan pancasila.

Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan bagi para dewasa untuk lebih mengawasi remaja yang sedang labil dalam mencari jati diri. Apabila mereka keluar dalam pengawasan maka lunturlah nilai-nilai pancasila. Hal ini akan menjadi ironi karena generasi muda bangsa yang seharusnya akan menjadi penerus bangsa kelak, telah tercemar.

Perlu usaha-usaha untuk menyelamatkan para remaja dari lunturnya nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Faktor-faktor lunturnya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab tentunya berasal dari diri manusia itu pribadi, namun akan lebih parah apabila mereka tidak mendapatkan faktor dukungan dari luar untuk tetap mempertahankannya. Ada berbagai cara agar manusia dalam hal ini remaja dapat menjadi pribadi yang baik. Pribadi yang baik didalam pandangan masyarakat Indonesia adalah pribadi yang mampu melaksanakan nilai-nilai pancasila. Adapun cara agar tumbuh menjadi pribadi pancasila dapat ditanamkan pada suatu tempat, diantaranya adalah sekolah.

Pendidikan merupakan upaya strategis dalam pembentukan sistem nilai yang ada dalam diri seseorang, kaitannya dengan perwujudan harkat dan martabat sebagai manusia sesuai dengan tatanan kehidupan masyarakat yang melingkupinya. Dengan perkataan lain pendidikan harus senantiasa di arahkan pada upaya peningkatan kesadaran dan harkat serata martabat seseorang baik selaku pribadi, anggota masyarakat maupun sebagai suatu bangsa. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa materi pelajaran yang disampaikan dalam kurikulum persekolahan tidak semata-mata untuk pengetahuan (intelektual), melainkan perlu direalisasikan dalam bentuk sikap dan perilaku nyata sehari-hari, sesuai dengan hakikat dan potensi manusia itu sendiri yang bersifat utuh.

(Nursid Sumaatmadja 2001: hlm. 15) menjelaskan bahwa “ keutuhan manusia itu bukan hanya pada sosok jasmaninya seperti makhluk hidup lainnya melainkan juga meliputi aspek akhlak, moral, dan tanggung jawab seperti khalifah dimuka bumi. Disinilah letak kewajiban keterpaduan antara pendidikan intelektual dengan keterampilan dan pendidikan umum.” Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa sistem pendidikan yang diterapkan di Indonesia belum dapat menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing dengan bangsa lain, hal ini ditunjukkan dari penelitian badan-badan internasional yang hasilnya bahwa Indonesia selalu mendapatkan nomor yang terbawah, bahkan di bawah negara-negara tetangga.

Untuk memperbaiki hal itu diperlukan upaya-upaya yang terncana dan terarah dalam suatu terutama dalam pembelajaran PKn yang mampu menggali seluruh potensi individu secra cerdas dan efektif demi terbenruknya masyrakat yang sejahtera lahir dan batin. Untuk itu, diperlukan pembaharuan/reformasi konsep dan paradigma pembelajaran PKn dari yang hanya menekankan pada aspek kognif menjadi penekanan pada pengembangan proses intitusi-intitusi negara dan kelengkapannya (Wahab, 1999 : hlm. 223).

Mengingatkan bahwa civic education seharusnya menjadi perhatian utama. Tidak ada tugas yang lebih penting dari pengembangan warga negara yang mempunyai pengetahuan, kemampuan dan karakter yang dibutuhkan dengan komitmen yang benar terhadap nilai-nilai dari prinsip fundamental dan demokrasi (Branson 1999: hlm. 3). Benyamin Barber (Branson,1999: hlm. 5) menjelaskan bahwa civic education adalah pendidikan untuk megembangkan dan memperkuat dalam atau tentang pemerintahan otonom (self government). Pemerintahan otonom yang demokratis berita bahwa warga negara aktif terlibat dalam pemerintahannya sendiri, mereka tidak hanya menerima didekte orang lain atau memenuhi tuntutan orang lain yang pada akhirnya cita-cita demokrasi dapat diwujudkan dengan sesungguhnya bila warga negara dapat berpartisipasi dalam pemeritahannya. Dalam demokrasi konstitusional, civic education yang efektif adalah suatu keharusan karena kemampuan berpartisipasi dalam masyarakat demokratis, berfikir secara kritis, dan bertindak secara sadar dalam dunia yang plural, memerlukan empati yang memungkinkan kita mendengar dan oleh karenanya mengakomodasi pihak lain, semuanya itu memerlukan kemampuan yang memadai.

Menurut Cogan, PKn digambarkan sebagai “kontribusi pendidikan untuk pengembangan karakteristik-karakteristik warga negara” (Cogan,1998: hlm. 3), dan proses tentang aturan pengajaran masyarakat, institusi, dan organisasi-organisasi dan peran warga Negara dalam masyarakat yang berfungsi secara baik.

Pada dasarnya tujuan PPKn adalah meng-Indonesiakan bangsa Indonesia karena melalui PPKn diharapkan bangsa Indonesia ini dapat menjadi seorang warga negara yang baik perilakunya, cerdas intelektualnya serta mengetahui kewajiban dan haknya sebagai warga Negara, selain itu mampu berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan. Jika dikaitkan dengan perannya dalam lingkup pendidikan maka PPKn ini adalah menyiapkan siswa yang baik, cerdas dan memiliki pengetahuan kewarganegaraan. Menurut (Maftuh 2009: 123) “Pendidikan kewarganegaraan menyiapakan siswa untuk menjadi warga Negara yang baik dengan menguasai pengetahuan kewarganegaraan (*knowledge*) yang berasal dari konsep dan teori berbagai disiplin ilmu, meyakini, mentransformasikan, dan mengamalkan nilai-nilai dan kebenaran yang menjadi pandangan hidup bangsa dan Negara (*virtues*) dan mampu menerapkan keterampilan berwarga Negara (*citizenship skill*).

Bila kita cermati secara saksama, maka orientasi pembelajaran PPKn adalah pembentukan sikap kewarganegaraan siswa (*civic* disposition). Sebagaimana diatur Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Tahun 2007 bahwa matapelajaran Pendidikan Kewarganegaraaan(Pkn) memiliki dua aspek yang harus dinilai yaitu aspek kognitif dan aspek afektif siswa. Serta diatur dalam PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 64 ayat (3) menyatakan bahwa “Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi peserta didik(penilaian domain afektif)”.

Seorang ahli berpendapat bahwa “sila kedua dari Pancasila sangatlah sejalan dengan kedua rukun Islam tadi, tapi yang lebih sejajar adalah nilai sosial dalam perintah zakat” (Kartohadiprojo 1970: hlm. 41). Seiring dengan berkembangnya zaman di era globalisasi yang semakin tidak terbendung lagi, pesantren sebagai sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial keagamaan senantiasa harus melakukan pengembangan. Pengembangan terutama di bidang kemanusiaan. Pengembangan pesantren tentu tidak terlepas dari adanya berbagai kendala yang harus dihadapi.

“Bhineka Tunggal Ika” merupakan semboyan bangsa Indonesia. Semboyan tersebut berasal dari Bahasa Jawa Kuna. Semboyan itu sendiri memiliki arti “Berbeda-beda tapi tetap satu”. Semboyan ini amatlah cocok untuk keadaan Indonesia yang dihuni oleh beragam suku, ras, agama dan kebudayaan. Nilai kesatuan amat dijunjung tinggi oleh leluhur bangsa Indonesia. Namun ironisnya, nilai tersebut semakin luntur dari kehidupan bermasyarakat. Masyarakat Indonesia tidak menerapkan dengan baik semboyan yang dimiliki bangsanya. Tindakan yang dilakukan pun cenderung berlawanan dengan semboyan tersebut.

Di beberapa daerah di Indonesia, kita dapat menemukan perilaku diskriminatif terhadap suku, ras ataupun agama tertentu. Salah satu contoh yang paling terlihat jelas adalah pembakaran gereja. Perilaku diskriminatif ini tentunya amat bertolak belakang dengan semboyan yang dianut bangsa Indonesia. Sementara, masih banyak contoh-contoh lain yang tidak diangkat media namun ada. Tindakan rakyat Indonesia tidak mencerminkan sama sekali semboyan yang dianuti. Perilaku diskriminatif ini dikarenakan adanya kesulitan dalam menerima perbedaan serta kecendrungan menganggap suku, ras, agama serta kebudayaan yang dimiliki adalah yang paling benar dan paling baik. Sementara yang lainnya salah dan jahat. Karena salah dan jahat, maka tidak salah jika disingkirkan ataupun dijauhi. Pada kenyataannya, tidak ada yang paling benar. Semua memiliki kekurangan masing-masing dan membutuhkan orang lain untuk memperbaiki dan menutupi kekurangan.

Perbedaan ada sebagai jawaban atas keperluan itu. Perbedaan selayaknya dipandang sebagai sebuah berkah dan dihargai karena perbedaan membuat negara Indonesia semakin kaya dan berwarna. Bangsa Indonesia selayaknya merasa bangga atas keragaman yang dimilikinya ini. Serta memanfaatkan perbedaan tersebut sebagai salah satu cara untuk memperkaya diri. Perbedaan tidak selayaknya menjadi pemecah kesatuan Indonesia. Tanpa kesatuan, Indonesia dapat dengan mudah diserang bangsa asing. Karenanya, amatlah penting untuk menerapkan semboyan “Bhineka Tunggal Ika” dalam setiap tindakan kita. Melalui karya tugas akhir ini, penulis berharap karyanya ini mampu menyadarkan kembali penonton mengenai indahnya perbedaan dan dimana perbedaan itu bukanlah suatu hal yang harus dipermasalahkan melainkan diterima sebagai bagian dari kehidupan. Sehingga pada akhirnya, masyarakat Indonesia diharapkan mampu bersikap sesuai dengan semboyan bangsa.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Nilai Ketuhanan Terhadap Kesadaran Bhineka Tunggal Ika”**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : **“**

1. Bagaimana langkah-langkah Implementasi nilai ketuhanan terhadap kesadaran bhineka tunggal ika di SMP Muhammadiyah Plus Cibiuk Garut?
2. Apa substansi nilai dalam menerapkan Implementasi nilai ketuhanan terhadap kesadaran bhineka tunggal ika di SMP Muhammadiyah Plus Cibiuk Garut?
3. Bagaimana respon peserta didik terhadap implementasi nilai ketuhanan di SMP Muhammadiyah Plus Cibiuk Garut
4. **Tujuan Penelitian**
5. Mendeskripsikan Bagaimana langkah-langkah Implementasi nilai ketuhanan terhadap kesadaran bhineka tunggal ika di SMP Muhammadiyah Plus Cibiuk-Garut.
6. Mendeskripsikan substansi nilai dalam Implementasi nilai ketuhanan terhadap kesadaran bhineka tunggal ika di SMP Muhammadiyah Plus Cibiuk-Garut.
7. Mendeskripsikan respon peserta didik terhadap implementasi nilai ketuhanan di SMP Muhammadiyah Plus Cibiuk Garut.
8. **Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti : Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman nyata dalam mengimplementasikan nilai ketuhanan terhadap kesadaran bhineka tunggal ika di SMP Muhammadiyah Plus Cibiuk-Garut.
2. Bagi Guru PKKn di SMP Muhammadiyah Plus Cibiuk Garut: Sebagai masukan untuk mengimplementasikan nilai ketuhanan yang maha esa guna meningkatkan pengetahuan peserta didik dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
3. Bagi peserta didik : Meningkatkan pengetahuan peserta didik dalam belajar pendidikan kewarganegaraan dengan implementasi nilai ketuhanan yang maha esa, sehingga peserta didik menyadari bahwa Indonesia adalah Negara bhineka tunggal ika.
4. Bagi peneliti lain : Sebagai bahan masukkan bagi para calon peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang implementasi nilai ketuhanan yang maha esa melalui pembelajaran PPKn.
5. **Variabel Penelitian Dan Indikator Penelitian**

Menurut (Sugiyono 2013: hlm. 32) “variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dan variabel terikat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Variabel Bebas : (variabel X) adalah Implementasi Nilai ketuhanan Yang Maha Esa.

Variabel X adalah variabel yang ,menjadi sebab perubahannya atau dapat mempengaruhi variabel lain dengan kata lain variabel X adalah masalah pendukung. Adapun indikator penelitian dari variable bebas (X) Implementasi Nilai ketuhanan Yang Maha Esa adalah sebagai berikut :

1. Peserta didik dngan mayoritas beragama islam harus nelaksanakan sholat 5 waktu
2. Kesadaran peserta didik untuk saling menghormati antar agama yang berbeda
3. Sikap toleransi peserta didik terhadap implementasi nilai ketuhanan yang maha esa. (Oktaviani Hidayat, 2019 : hlm 223)
4. Variabel terikat (variabel Y) adalah meningkatkan kesadaran peserta didik.

Variabel Y adalah variable yang nilainya dipengaruhi oleh variabel lain bisa di katakana variabel Y adalah masalah utama di dalam suatu penelitian yang nantinya akan menjadi out put. Adapun indikator penelitian dari variable (Y) meningkatkan kesadaran peserta didik adalah sebagai berikut :

1. Keberanian peserta didik dalam mempertanggungjawabkan kesalahannya.
2. Sikap toleransi peserta didik dan tidak berkelahi antarsesama.
3. Sikap peserta didik yang dapat menghormati guru. ( Tri Budi Harto, 2013 : hlm. 171).

# **Anggapan Dasar dan Hipotesis**

1. **Anggapan Dasar**

Seorang ahli mengatakan “beranggapan dasar atau asumsi merupakan sebuah titik tolak pemikiran yang sebenarnya telah di terima oleh penyelidik yang melandasi penelitian” (Arikunto, 1997: hlm. 58). Adapun asumsi yang saya kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. (Nurdin Usman, 1997 : hlm. 231).
2. Nilai ketuhanan Yang Maha Esa Mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pancipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa indonesia merupakan bangsa yang religius bukan bangsa yang ateis. Nilai ketuhanan juga memilik arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antarumat beragama. (Koentjaraningrat, 1889 : hlm. 223).
3. Kesadaran peserta didik adalah suatu keadaan seseorang manusia dimana dirinya memperhatikan, mempedulikan, dan memikirkan hal yang diketahui/diingat/dirasakan oleh dirinya sendiri kemudian dirinya memberikan respon terhadap hal tersebut. Fungsi kesadaran diri terdiri dari Untuk mengawasi dan menjaga diri, untuk deteksi diri dan penyuntingan kesalahan, untuk pengambilan keputusan dan bersikap, untuk mengatur kepribadian dan tingkah laku (organisasi diri), dan untuk pembelajaran dan adaptasi diri. ( Satria Novian, 2011 : hlm. 123)
4. Bhinneka Tunggal Ika adalah beraneka ragam satu itu yang bermakna walaupun beraneka ragam tetapi bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan ini menggambarkan bangsa Indonesia yang terdiri atas banyak suku, bahasa, ras dan agama mampu menjaga persatuan dalam persaudaraan bangsa dan negara. (Dr. Richard D, 1898:hlm. 323).
5. **Hipotesis**

Hipotesis menurut (Sugiyono, 2013 :hlm. 96) “merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Dari pendapat ahli tersebut dapat dikatakan bahwa hipotesis adalah kesimpulan sementara dari penelitian yang dilakukan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Ha : Ada pengaruh yang signifikan terhadap Implementasi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pembelajaran PPKn dalam meningkatkan kesadaran peserta didik bahwa Indonesia Negara bhineka tunggal ika.

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap Implementasi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pembelajaran PPKn dalam meningkatkan kesadaran peserta didik bahwa Indonesia Negara bhineka tunggal ika.

# **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi diantaranya dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian pembuka skripsi dan bagian isi skripsi. Bagian pembuka skripsi terdiri dari halaman sampul, halaman pengesahan, halaman moto dan persembahan halaman pernyataan keaslian skripsi, kata pengantar, ucapan terimakasih, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran.

Bagian isi skripsi berisi uraian penelitian mulai dari bagian pendahuluan sampai bagian penutup yang tertuang kedalam bentuk bab-bab sebagai satu kesatuan. Pada skripsi ini penulis mengungkapkan hasil penelitian dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, dan definisi operasional.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Pada bab ini berisi teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini mengemukakan tahapan persiapan penelitian, rangsangan populasi dan sampel serta instrumen yang akan digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Bab ini menguraikan analisis pengolahan data yang telah diperoleh dari hasil tes, ngket dan observasi.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dan saran yang sudah diperoleh dari hasil penulisan tugas akhir.